

EVALUASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM PENINGKATAN
KUALITAS PENDIDIKAN DI KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2016.

Bimo Prio Utomo

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email : Bimo.Prio.2014@Fisipol.Umy.ac.id/ Bimo_Prioutomo@yahoo.com

NASKAH PUBLIKASI

EVALUASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM PENINGKATAN
KUALITAS PENDIDIKAN DI KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2016.

Di Susun Oleh :

Bimo Prio Utomo

20140520134

Dosen Pembimbing



Dr. Dyah Mutiarin, M.Si.

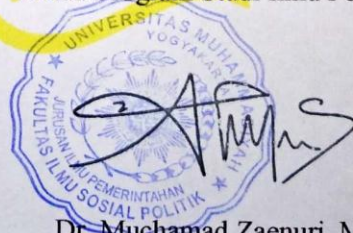
Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



Dr. Titin Purwaningsih, S.IP., M.Si.



Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si.

ABSTRAK

Pemerintah Indonesia Melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) dimulai pada tahun 2007, sedangkan pelaksanaan di Kabupaten Lamandau pada tahun 2014. PKH mempunyai sasaran berupa Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yaitu Ibu Hamil/ Nifas, Lansia, Disabilitas, dan Bidang pendidikan. PKH memiliki tujuan utama yaitu Memutus rantai Kemiskinan pada Keluarga melalui bidang Pendidikan. Rentang waktu 2014-2016 PKH hanya dilaksanakan pada 3 Kecamatan dari 8 Kecamatan yang ada di Kabupaten Lamandau. Masalah PKH di Kabupaten Lamandau mengenai bentuk Pemanfaatan dan Kesadaran Penerima PKH, Peneliti akan berfokus pada bidang Pendidikan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif yang bersifat Deskriptif bertujuan agar mengetahui perilaku dalam memanfaatkan bantuan PKH Pendidikan. sedangkan tehnik pengumpulan data menggunakan Metode Wawancara dan Dokumentasi, serta meminta saran Rekomendasi Narasumber. Peneliti menyusun Karya Ilmiah ini dengan memfokuskan permasalahan pada pelaksanaan PKH pada bidang pendidikan melalui sudut pandang Evaluasi dengan Metode CIPP.

Melihat hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa, PKH memiliki dampak yang baik pada Pendidikan di Kabupaten Lamandau. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan pada bidang pendidikan tidak dapat dilihat hasilnya secara langsung. Namun, pengaruh pada Angka Melek Huruf, Partisipasi Sekolah, dan Perbaikan Status Pendidikan mengalami peningkatan perlahan. walaupun peningkatannya dapat dikatakan sangat kecil, hal tersebut sesuai dengan pelaksanaan PKH yang hanya dilakukan pada 3 Kecamatan.

Saran dalam pelaksanaan PKH agar dapat memperbaiki kordinasi antara pusat dan daerah, peningkatan jumlah penerima PKH pendidikan (Kabupaten Lamandau). Perlunya dilakukan perbaikan dalam mengusahakan jadwal pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Serta dalam proses pemuthakiran data harus lebih ditingkatkan lagi agar menjadi lebih maksimal dan memiliki dampak yang terlihat.

Kata Kunci : Evaluasi, Program Keluarga Harapan, Pendidikan.

Pendahuluan

Kemiskinan Merupakan salah satu masalah yang selalu menjadi perhatian Pemerintah Indonesia. Kemiskinan adalah sebagai suatu keadaan seorang manusia atau keluarga yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok (Rachmawati, 2005). Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada september 2016 mencapai 27,76 juta jiwa, sebanyak 17,39 juta tinggal di Desa, sedangkan sisanya berada di Perkotaan. Penduduk yang termasuk kedalam kategori miskin dilihat dari data penghasilan perkapita setiap bulan. Menteri Perencanaan pembangunan Nasional (PPN) Bambang Bojonegoro mengungkapkan, bahwa penduduk yang masuk ke bawah garis kemiskinan memiliki penghasilan dibawah Rp 361.990 perkapita setiap bulan.

Penduduk miskin tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok, kebutuhan tersebut dapat diartikan berupa Sandang, pangan, dan papan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, fakta menjelaskan bahwasanya Negara Indonesia adalah salah satu Negara di dunia yang sangat banyak memiliki kekayaan Alam. Hal tersebut menjadi tidak sesuai Bagi Negara yang memiliki kekayaan alam, namun terdapat penduduk Miskin. Kemiskinan yang ada di Indonesia tidak sepenuhnya disebabkan oleh rakyat yang tidak dapat memanfaatkan kekayaan alam yang ada. Melainkan Pemerintah sebagai yang mengatur agar Negara menjadi sejahtera melakukan kesalahan manajemen program kesejahteraan. Permasalahan kesalahan manajemen tersebut juga disebabkan oleh pejabat yang melakukan korupsi.

Mengatasi masalah kemiskinan, pemerintah menerapkan suatu program yang dilakukan secara transparan untuk mencegah terjadinya korupsi. Solusi yang dilakukan pemerintah dengan menerapkan Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan memiliki tujuan untuk membuat masyarakat menjadi mandiri, untuk memutus rantai kemiskinan dengan memberikan bantuan pendidikan (utamanya). Hal tersebut dimaksudkan agar masyarakat indonesia memiliki pengetahuan untuk dapat memanfaatkan kekayaan yang melimpah. "Kartasmita (1996, 241), mengungkapkan bahwa kekayaan alam tidak dimanfaatkan dengan

maksimal karena kurangnya pengetahuan dibidang tersebut”. Sehingga pemerintah menginginkan pemberian bantuan PKH untuk memutus rantai keturunan kemiskinan dikeluarga tersebut melalui peningkatan pendidikan.

Saat pemerintah melaksanakan PKH, evaluasi yang dilakukan dirasa kurang maksimal. Hal ini dapat dilihat dari perbaikan yang dilakukan pemerintah dalam melaksanakan PKH pada tahun setelahnya. Evaluasi, Pendataan, dan TransParansi dari jumlah bantuan diberikan kepada penerima Bantuan serta pembimbing PKH yang hanya sebatas menyalurkan saja, tidak melakukan tugas bimbingan dengan maksimal Kepada Penerima. Berfokus pada Evaluasi yang memiliki tujuan, hal itu mengacu pada pendapat “*Suharsimi Arikunto, 1993: 297* Melakukan Evaluasi Program adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat keberhasilan dari kegiatan yang direncanakan”. Evaluasi PKH dibeberapa Kabupaten atau kota dirasa belum serius, karena PKH hanya menjadi salah satu Program bantuan (tidak memiliki arti perubahan yang signifikan).

Masyarakat Indoneisa yang mendapatkan bantuan PKH tidak paham dengan tujuan yang sebenarnya. Pola pikir masyarakat yang masih ketergantungan dengan PKH menjadi tidak mandiri, padahal tujuan PKH adalah untuk memutus rantai kemiskinan. PKH memiliki sasaran yaitu rumah Tangga sangat miskin (RTSM) yang memiliki penghasilan dibawah Rp 361.990 setiap bulan. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan pertama kali dilaksanakan di 7 Provinsi dan 48 Kabupaten/ Kota pada tahun 2007 Jumlah penerima sekitar 387.928 penduduk. Dampak baik didapatkan setelah dilaksanakannya PKH, pada tahun 2011 PKH dikembangkan menjadi 25 Provinsi dan 118 Kabupaten/ Kota jumlah penerima 1,1 juta penduduk. Puncak dari pelaksanaan PKH di Indonesia pada tahun 2014 yaitu sebanyak 3,2 juta penduduk penerima Bantuan PKH.

Program Keluarga Harapan ini memiliki beberapa kriteria (RTSM) sasaran yang akan menerima bantuan yaitu:

1. Ibu Hamil/ Nifas/ Anak Balita.
2. Anak Usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan dasar (anak pra sekolah).
3. Anak Usia SD/MI/Paket A/SDLB (usia 7-12 tahun).
4. Anak SLTP/MTs/Paket B/SMLB (Usia 12-15).
5. Anak 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar termasuk anak dengan disabilitas.

Mengacu pelaksanaan PKH di Kabupaten Lamandau, berikut data yang didapatkan peneliti dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2016. Data ini hanya yang digunakan pada 3 Kecamatan dari 8 Kecamatan yang dilaksanakan PKH. Jumlah PKH Ibu Hamil/ Menyusui ada 208 Keluarga Penerima Manfaat, Jumlah PKH Lansia dan Disabilitas 78, dan Jumlah PKH Pendidikan 36. Melihat 5 kriteria yang berhak mendapatkan bantuan PKH tersebut 4 hal yang difokuskan pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan yaitu pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk memutus rantai kemiskinan yang dilakukan pemerintah. Penulis ingin berfokus kepada Evaluasi yang dilakukan pemerintah dalam memaksimalkan pelaksanaan PKH sehingga meningkatkan kualitas pendidikan.

Permasalahan tersebut menjadi salah satu yang akan dilakukan penelitian mengenai PKH Pendidikan. Bantuan tersebut dimaksudkan untuk membantu RTSM yang tidak mampu untuk membiayai pendidikan sekolah anaknya. Pendidikan merupakan kunci untuk memutus rantai kemiskinan pada RTSM. Sehingga, dengan diberikan bantuan seharusnya Kualitas Pendidikan dan Indeks Pembangunan Manusia Meningkat (IPM). Indeks Pembangunan Manusia didalamnya masih berhubungan dengan pendidikan (kualitas). Ada beberapa indikator yang harus dipenuhi untuk melihat atau menilai IPM disuatu daerah bahkan negara di katakan baik ataupun buruk. Indikator tersebut diterapkan oleh United Nations

Development Programme (UNDP), (Report 1993: 105-106) adalah sebagai berikut :

1. *Longevity*, diukur dengan variabel harapan hidup saat lahir atau life expectancy of birth dan angka kematian bayi perseribu penduduk atau *infantmortality rate*.
2. *Educational Achievement*, diukur dengan dua indikator, yakni melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas (*adult literacy rate*) dan tahun rata-rata bersekolah bagi penduduk 25 ke atas (*the mean years of schooling*).
3. *Access to resource*, dapat diukur secara makro melalui PDB riil perkapita dengan terminologi *purchasing power parity* dalam dolar AS dan dapat dilengkapi dengan tingkatan angkatan kerja

Melihat dari indikator ketiga indikator IPM semuanya memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan PKH. Namun, peneliti akan membahas yang berada di poin kedua yaitu berhubungan dengan pendidikan. Meningkatnya partisipasi sekolah serta melek huruf menjadi tolak ukur untuk dikatakan baik.

Ada Beberapa Kabupaten/ Kota memiliki IPM yang menurun, sedangkan bantuan PKH pendidikan terus dilakukan. Karena bantuan yang diberikan tidak berpengaruh secara signifikan atau hanya beberapa Daerah yang mengalami sedikit peningkatan kualitas pendidikan. Kabupaten lamandau sebagai lokasi dilakukannya penelitian, pada tahun 2013 IPM berada diangka 73,29% (data badan pusat statistik kab Lamandau). Namun, pada tahun 2014 IPM kabupaten lamandau menurun menjadi 67,53%, padahal PKH pada tahun 2014 tetap dilaksanakan (bahkan ditingkatkan alokasi dana). Bahkan, Rata-rata lama sekolah pada tahun 2013 berada di 7,84 tahun, sedangkan pada tahun 2014 berada diangka 7,64 tahun mengalami penurunan.

PKH di Kabupaten lamandau pada tahun 2015 menghabiskan dana sebesar Rp. 120.172.500 pada gelombang II dan IV. Dana tersebut

dibagikan kepada 387 RTSM (sasaran) penerima bantuan PKH. Namun melihat data BPS Kabupaten Lamandau yang dengan diberikan bantuan PKH pendidikan kepada untuk bisa menyambung pendidikan. Seharusnya, angka presentase IPM menjadi meningkat karena dari partisipasi pendidikan saja sudah meningkat. Hal terbalik terlihat karena ada ke tidak sesuai'an dalam pelaksanaan PKH di Kabupaten Lamandau. Hal ini jelas terlihat dari penerima PKH yang meningkat tetapi IPM menurun. Peneliti melihat masalah ini dari sudut pandang Evaluasi yang di lakukan oleh Pemerintah Daerah (pelaksana).

Metode Penelitian

Dalam Penelitian ini, Peneliti Menggunakan Metode penelitian ini deskriptif dengan analisa data kualitatif. Jenis Penelitian ini menggunakan pendekatan lapangan (Field Research), dan juga menggunakan pendekatan (Libary Research) yang akan menggunakan teori-teori pendukung dari Buku/ Literatur terkait. Peneliti menggunakan metode lembar bola dalam mendapatkan rekomendasi Narasumber. Data yang digunakan merupakan data Primer dan Skunder yang didapat saat Penelitian.

Peneliti mengumpulkan data dengan 2 Metode yaitu Wawancara dan dokumentasi di Lapangan. Pada proses analisis/ Pengelolahan data untuk menjawan Rumusan masalah, Peneliti Menggunakan Metode Reduksi dan Display data.

Pembahasan

Peneliti memfokuskan pada Evaluasi, yang menggunakan Model CIPP. Evaluasi hanya pada pengaruh Pelaksanaan Program Keluarga Harapan terhadap Pendidikan yang ada di Kabupaten Lamandu. Berikut data Penerima PKH 2016.

Data Penerima PKH Kecamatan Lamandau.

JUMLAH PENERIMA PKH KAB LAMANDAU PADA TAHUN 2016			
NO	Kecamatan	Desa	Jumlah KPM
2	LAMANDAU	TANJUNG BERINGIN	25
		SAMUJAYA	19
		TAPIN BINI	19
		SUJA	7
		PANOPA	18
		CUHAI	14
		BAKONSU	16
		SUNGAI TUAT	12
		SEKOBAN	4
		KARANG TABA	8
		KAWA	21
JUMLAH KPM KECAMATAN LAMANDAU			163

Data bersumber melalui Dinas Sosial Kab Lamandau 2016

Tabel 2.5

Data Penerima PKH Kecamatan Delang.

JUMLAH PENERIMA PKH KAB LAMANDAU PADA TAHUN 2016			
NO	Kecamatan	Desa	Jumlah KPM
3	DELANG	SEPOYU	10
		PENYOMBAAN	17
		SEKOMBULAN	59
		LOPUS	47
		KUBUNG	27
		NYALANG	14
		HULU JOJABO	4
		RIAM TINGGI	8
		RIAM PENAHAN	5
		KUDANGAN	30
JUMLAH KPM KECAMATAN DELANG			221

Data bersumber melalui Dinas Sosial Kab Lamandau 2016

Data Penerima PKH Kecamatan Bulik Timur.

JUMLAH PENERIMA PKH KAB LAMANDAU PADA TAHUN 2016			
NO	Kecamatan	Desa	Jumlah KPM
1	BULIK TIMUR	BATU TUNGGAL	28
		MERAMBANG	48
		SUKAMAJU	8
		BUKIT JAYA	32
		PEDONGATAN	14
		NANGA KORING	6
		TOKA	5
		NUANGAN	3
		SUNGKUP	9
		NANGA PALIKODAN	1
JUMLAH KPM KECAMATAN BULIK TIMUR			154

Data bersumber melalui dinas Sosial Kab Lamandau 2016

A. Evaluasi Konteks

Seperti yang ada pada bab I yang dimaksudkan Evaluasi yaitu upaya menjabarkan kesejahteraan dan jaminan sosial dalam ruang lingkup pelaksanaan PKH di Kabupaten Lamandau Jaminan Sosial. Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat setelah dilaksanakannya Program Keluarga Harapan mengalami perbaikan. Namun, pada bidang Pendidikan Kesejahteraan belum dirasakan maksimal, hal itu memiliki Implikasi terhadap Pemanfaatan dana PKH. Pemanfaatan bantuan PKH selain bidang Pendidikan dapat dikatakan kurang berhasil. Memfokuskan pada pemanfaatan PKH Pendidikan di Kabupaten Lamandau memiliki perubahan yang baik. Perubahan baik tersebut dapat di lihat melalui data APM (angka Partisipasi Murni) Sekolah. Angka Partisipasi Murni Pendidikan.

Jenjang Pendidikan	APM	APM
	2015	2016
SD/MI	93	100
SMP/MTs	82.78	85.65
SMA/MA	46.38	48.33

Data di dapat dari Dinas Pendidikan Kab Lamandau 2016

Pada data tersebut menjelaskan bahwa pada ketiga jenjang pendidikan mengalami peningkayan angka partisipasi murni. Pada jenjang SD/MI tahun 2015 diangka 93 dan pada tahun 2016 menjadi 100, pada jenjang SMP dan MTs tahun 2015 82,78 dan tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 85,65, pada jenjang SMA/ MA tahun 2015 diangka 46,38 dan pada tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 48,33. Peningkatan pada angka partisipasi murni pada semua jenjang pendidikan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Pada hal Jaminan Sosial, PKH berperan memenuhi Kebutuhan siswa dalam Keperluan Sekolah. Bantuk pemanfaatan tersebut berupa Lembar Kerja siswa (LKS), Seragam Sekolah, Tas, Sepatu, dan Keperluan pendukung sekolah. Dengan, bentuk pemanfaatan yang benar akan memperbaiki tingkat pendidikan anak pada keluarga tersebut sehingga dapat memutus rantai kemiskinan.

B. Evaluasi Input

Tahap kedua dari Model CIPP ini adalah Evaluasi masukan (input). Pada tahap ini peneliti menemukan jumlah data peserta penerima bantuan PKH yang menjadi RTSM, data tersebut dapat dilihat pada bab II. Dari jumlah penduduk miskin 33.712 di Kabupaten Lamandau yang mendapatkan bantuan PKH sebanyak 538 KK dan yang mendapatkan bantuan PKH pendidikan hanya 36 KK. Pada Evaluasi Input ada beberapa Masukan yang sudah diklasifikasikan oleh peneliti sebagai berikut :

Kesimpulan Masukan.

No	Masukan	Solusi (sementara). Data
1	Data KPM yang tidak sesuai setelah dilakukan verifikasi. data tersebut di tentukan oleh pemerintah pusat, daerah hanya melakukan verifikasi dan validasi.	Peneliti merekomendasikan dalam menentukan KPM, pemerintah pusat dapat rekomendasi dari daerah, walaupun akhirnya penerima KPM ditentukam pusat. setidaknya daerah bisa merekomendasikan KPM yang menerima bantaun.
2	Lokasi yang dilakukan verifikasi sangat luas, contohnya Kecamatan Bulik Timur.	Paling tidak ada 2 pembimbing lapangan, atau dapat disesuaikan dengan lokasi Kecamatan tersebut.
3	Pencairan bantuan PKH tidak tepat waktu, sehingga pemanfaatan pada Pendidikan tidak secara maksimal. Contohnya dalam membeli SKS harusnya diawal semester atau kelas. Karena pencairan terlambat jadi pembelian LKS dengan percuma.	Harus ada pematangan jadwal dalam pelaksanaan Program PKH. tahun 2015 tidak ada keterlambatan, namun pada tahun 2016 ada keterlambatan. Harusnya dicairkan 4 tahap. Malah dijadikan 1 tahap (langsung semua).
4	Jumlah bantuan yang diberikan harus disesuaikan dengan lokasi pelaksanaan Program dilihat dari harga pokok daerah tersebut.	Mengkaji ulang jumlah bantuan PKH untuk daerah-daerah yang jauh dari sektor ekonomi. Sehingga bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan dengan baik dan bijak.

Inti dari percakapan bersama kordinator Kecamatan 2017.

Masukan tersebut adalah kendala yang dialami pelaksana Program Keluarga Harapan yang ada di Daerah.

Pada Evaluasi Input ini peneliti juga memasukan pada hal Bimbingan Pendidikan. Walaupun sebenarnya sudah ada pada Standard Operasional Pelaksana , namun yang di maksud dengan Bimbingan Pendidikan disini merupakan usaha merubah pola pikir agar mengutamakan Pendidikan. Hal itu akan memiliki output pada Pemanfaatan Dana PKH yang diberikan secara Maksimal pada bidang Pendidikan.

C. Evaluasi Proses

Pada Evaluasi Proses Model CIPP ini peneliti memfokuskan pada 2 hal yaitu proses administrasi dan pelaksanaan Program keluarga harapan yang ada di Kabupaten Lamandau tahun 2016. Proses Administrasi dimulai saat data yang diberikan pemerintah pusat melalui provinsi kepada kabupaten, data tersebut berupa nama keluarga penerima manfaat. Data tersebut akan dibagikan kepada pembimbing lapangan disetiap kecamatan yang ada di Kabupaten lamandau. Data tersebut akan dilakukan verifikasi untuk menentukan bahwa keluarga tersebut benar-benar berhak menerima bantuan PKH.

Setelah dilakukan verifikasi, tahap selanjutnya yaitu validasi dan pencairan pertama dan kedua. Tugas pembimbing lapangan selanjutnya yaitu melihat komitmen dari penerima PKH dalam pemanfaatan dana yang diberikan di tahap 1 dan 2. Komitmen ini menentukan untuk dilakukannya pencairan tahap 3 dan 4. Proses administrasi untuk kecamatan delang agak sedikit lebih susah dengan 2 kecamatan lainnya karena KPM belum semua

paham dengan teknologi, jadi pembimbing lapangan lebih ekstra dalam memberikan bantuan dalam pencairan PKH. administrasi pendidikan sama persis dengan bantuan PKH pada sektor lainnya, yang menjadi perbedaan adalah bantuan tersebut dimanfaatkan pada bidang pendidikan.

Pelaksanaan PKH di Kabupaten Lamandau dapat di katakan sesuai harapan. Hal ini dapat diketahui dari rata-rata yang diwawacarai mengharapkan tahun depan mendapatkan bantuan PKH kembali. Pada bidang Pendidikan PKH sudah mengalami peningkatan, dari 538 KPM yang mendapatkan bantuan Pendidikan sekita 36 KPM. Hal ini dilihat dari tabel berikut.

Tabel
Keluarga Penerima Manfaat Bidang Pendidikan.

No	Kecamatan	Usia	Jumlah (anak)
1	Delang	7-12 tahun	6
		12-15 Tahun	4
		15-18 Tahun	2
2	Bulik Timur	7-12 tahun	5
		12-15 Tahun	6
		15-18 Tahun	2
3	Lamandau	7-12 tahun	5
		12-15 Tahun	4
		15-18 Tahun	2
Juamlah			36 Anak

Data bersumber dinas Sosial Kabupaten lamandau 2016.

Dari data diatas ada 36 Anak yang tidak mampu dan tidak ingin kesekolah karena minder. Data tersebut merupakan data tahun 2016, dapat dipahami bahwa Kecamatan Bulik Timur memiliki jumlah yang paling banyak yaitu 13 anak. Dan yang paling rendah Kecamatan Lamandau ada

11 anak. Pelaksanaan PKH pendidikan di Kabupaten Lamandau berjalan semestinya, sesuai dengan ketentuan pelaksanaan yang ada.

D. Evaluasi Product

Evaluasi hasil (product) ini digunakan untuk menentukan keputusan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Dengan demikian, evaluasi ini diarahkan pada keseluruhan dampak dari suatu program terhadap RTSM/KSM. Namun, peneliti memfokuskan pada 2 hal yaitu peningkatan status pendidikan dan peningkatan angka melek huruf. Pelaksanaan PKH pendidikan ini tidak dapat langsung dilihat hasilnya. Hal ini dikarenakan pendidikan perlu waktu, peran penting dilakukan pembimbing lapangan dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap bantuan PKH pendidikan agar sesuai dengan tujuan PKH yaitu memutus rantai kemiskinan.

Tujuan Pemerintah memutus rantai kemiskinan melalui PKH dirasa sudah sesuai, karena pendidikan dapat dirasakan dalam jangka panjang. Peneliti menyimpulkan beberapa hasil wawancara yang mengatakan bahwa PKH ini membuat keluarga tersebut bisa menyekolahkan anaknya. Sehingga diharapkan PKH tahun selanjutnya memiliki peningkatan agar dampak pada Pendidikan juga meningkat.

Kabupaten Lamandau pada tahun 2016 presentase angka melek hurufnya yaitu 93,76%. Hal tersebut menjadikan Kabupaten Lamandau menjadi peringkat 13 dari 14 kabupaten dan Kota yang ada diseluruh Kalimantan Tengah. Serta Kabupaten Lamandau juga memiliki angka buta

huruf sbesar 6.24%. peringkat angka buta hurufnya ada di 13 dari 14 kabupaten kota. Sedangkan yang paling tinggi angka buta hurufnya adalah Kabupaten Sukamara. Dari angka melek huruf Kabupaten Lamandau masih dapat dikatakan kurang baik dalam hal peningkatan status Pendidikan.

Angka melek huruf mengalami penurunan dapat dimaklumi karena PKH pendidikan hanya memiliki 36 KPM dan pelaksanaan PKH tahun 2016 hanya pada 3 Kecamatan. Peneliti menyimpulkan pada sub angka melek huruf, bahwasanya bantuan PKH di Kabupaten lamandau sangat berdampak pada angka melek huruf. Namun, hanya jumlahnya saja yang kecil sehingga bila dipresentasikan tidak dapat dilihat melalui angka.

Kesimpulan

Peneliti menyusun Kesimpulan mengacu pada empat Elemen utama yang menjadi kerangka dalam penyusunan pembahasan yaitu Evaluasi Konteks, Input, Proses, dan Product. Berikut Kesimpulan dari keempat Elemen utama tersebut :

a. Konteks, Evaluasi Konteks dapat dipahami bahwasanya pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Lamandau sudah berjalan dengan baik. Namun, perlu adanya perbaikan yang dilakukan oleh pembimbing PKH dalam memberikan pengertian tujuan dan pemanfaatan bantuan yang diberikan.

b. Input, Evaluasi Input diketahui bahwa ada beberapa permasalahan di Kabupaten Lamandau dalam pelaksanaan PKH. Permasalahan tersebut Data Calon Penerima PKH banyak yang meleset saat dilakukan verifikasi, tidak ada wewenang daerah untuk menambahkan jumlah penerima PKH (hanya dapat menghapus), satu Kecamatan yang terlalu luas untuk dilakukan verifikasi oleh 1 pembimbing PKH, dan ketepatan waktu pencairan.

c. Proses, Evaluasi proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan sudah berjalan dengan baik (sesuai SOP), tidak ada hal menyimpang yang peneliti temukan. Namun, masyarakat lah yang harus lebih diberi pemahaman untuk pemanfaatan bantuan.

d.Product, Evaluasi Product dalam pelaksanaan PKH memiliki dampak pada peningkatan status pendidikan, tujuan memutus rantai kemiskinan dan menurunkan angka melek huruf sudah sesuai. Namun, karena jumlah penerima yang sedikit dampak tersebut tidak dapat dilihat langsung pada data IPM atau Kualitas Pendidikan.

Daftar Pustaka

Buku

Effendi, Tadjuddin Noer. *Sumber Daya Manusia Peluang Kerja dan Kemiskinan*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacan Yogya. 1993.

Arikunto, Suharsimi. *Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoritis Praktis Bagi Mahasiswa Dan Praktisi Pendidikan*, Edisi Kedua, Cet. 4, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Goode, William J. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Jurnal

Simanjuntak, M. (2010). *Faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan keluarga dan prestasi belajar anak pada keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH)*.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2008. *Program Keluarga Harapan-PKH. Two cases studies on implementing the Indonesian condition cash transfer program. Working Paper No. 5*. Jakarta : The Pro-Poor Planning and Budgeting Project.

Badan Kordinasi Keluarga Berencana Nasional. 2001. *Indikator kesejahteraan keluarga*. Jakarta : BKKBN

Hamid Nasuhi, dkk., Idris Thaha, ed., *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* Jakarta: CeQDA (Center for Quality Development and Assurance, 2007.

Kementerian Sosial, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan*, Jakarta: Direktorat Jaminan Sosial, 2013.

Rahayu, S. K., Toyamah, N., Hutagalung, S., Rosfadhila, M., & Syukri, M. (2008). *Studi Baseline Kualitatif PNPM Generasi dan PKH: Ketersediaan dan*

Penggunaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak dan Pendidikan Dasar di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lembaga Penelitian SMERU. Jakarta.

Syamsir, N. (2014). *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Bidang Pendidikan di Kecamatan Tamalate Kota Makasar. Skripsi Online. <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/1234,56789,8851>.*

Rachmawati, A. (2010). *Strategi Koping dan Faktor-faktor yang mempengaruhi Kesejahteraan Subjektif pada Keluarga Penerima Program Keluarga Harapan (PKH).*

Dharmawan *et al.* 2009. *Agenda riset strategis bidang penanggulangan kemiskinan 2010 – 2015.* Bogor : Institut Pertanian Bogor.

Rachmawati, A. (2010). *Strategi Koping dan Faktor-faktor yang mempengaruhi Kesejahteraan Subjektif pada Keluarga Penerima Program Keluarga Harapan (PKH).*

Utomo, D. (2014). *Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin (Studi Pada Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri).* *Jurnal Administrasi Publik*, 2(1), 29-34.

Syamsir, N. (2014). *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Bidang Pendidikan di Kecamatan Tamalate Kota Makasar. Skripsi Online. <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/1234,56789,8851>.*

Nindika, N. N. (2011). *Hubungan Kompetensi Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dengan Keberlanjutan Pendidikan Anak Peserta.*

Sykora, M. D., Jackson, T. W., O'Brien, A., & Elayan, S. (2013, August). *National security and social media monitoring: A presentation of the emotive and related systems.* In *Intelligence and Security Informatics Conference (EISIC), 2013 European*(pp. 172-175). IEEE.

- Wu, L. (2013). *Social network effects on productivity and job security: Evidence from the adoption of a social networking tool*. *Information systems research*, 24(1), 30-51.
- Boldrin, M., De Nardi, M., & Jones, L. E. (2015). *Fertility and social security*. *Journal of Demographic Economics*, 81(3), 261-299.
- Hutagalung, S. A., Arif, S., & Suharyo, W. I. (2009). *Problems and challenges for the Indonesian conditional-cash transfer programme-program keluarga harapan (PKH)*. *Social Protection in Asia Working Paper*.
- Sosial, D. J., Perlindungan, D. J., & Sosial, J. (2013). *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH)*. *Kementrian Sosial RI*.
- Sparrow, R., Moeis, J. P., Damayanti, A., & Herawati, Y. (2008). *Conditional Cash Transfers in Indonesia: Baseline Survey report Program Keluarga Harapan and PnPm Generasi*. *World Bank*. Washington, DC, June.

Website

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Barat. 2006. Program Keluarga Harapan, upaya menanggulangi kemiskinan. www.bappeda-jabar.go.id.
- Pemerintah Kabupaten Lamandau. 2016. Data Kemiskinan. www.Pemkab-Lamandau.go.id
- Badan Pusat statistik Kabupaten Lamandau. 2015-2017 Data Pendukung Penyusunan Pembahasan. www.Bps-Lamandau.go.id